

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata 1
pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

RULLYNANTO CAHYO YOANIKA

B200130212

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RULLYNANTO CAHYO YOANIKA

B200130212

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D)

NIK/NIDN. 977/0621017901

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)**

Oleh:

RULLYNANTO CAHYO YOANIKA
B 200130212

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari 21 Oktober 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:

1. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dra. Mujiyati, MSi
(Anggota 1 Dewan Penguji)


()

3. Fauzan, SE, MSi, Ak.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

()
(Dr. Syamsudin, MM)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2018



RULLYNANTO CAHYO YOANIKA

B200130212

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)**

Abstrak

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Daerah Bidang Pendidikan (BDBP) sebagai variabel moderating. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, pengujian metode dengan Moderating Research Analysis (MRA) dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,082 yang berarti bahwa variasi variabel IPM dapat dijelaskan 8,2% sedangkan sisanya 91,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, PAD*BDBP dan DAU*BDBP berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa BDBP tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan DAU pada IPM. Akan tetapi PAD dan DAU berpengaruh terhadap IPM dan BDBP berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan PAD pada IPM.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Daerah Bidang Pendidikan(BDBP)

Abstract

This research aims to examine the influence of the Local Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) to Human Development Index (HDI) by using Expenditure Allocation in Education (BDBP) as a moderating variable. By using Quantitative method analysis, this research use city/district in entire Java as population and purposive sampling method for sampling data. Further, Moderating Research Analysis (MRA) and classical assumption test were also used for determining the Data. The result shows that the degree of coefficient of determination was 0.082 which means that as far as 8.2% variation of HDI variables could be explained by the model whether the remained 91.8% was explained by others factors outside the study. the simultaneous test results indicate that PAD, DAU, PAD*BDBP, and DAU*BDBP have significant influence on HDI, while the partial test result shows that PAD and DAU have significant influence to HDI and BDBP has a significant effect and able to moderate the relationship of PAD and HDI. However, it is proofed that BDBP has no

significant effect and could not able as moderating variable to the relationship between DAU and HDI.

Keyword : *Local Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Human Development Index (HDI), Expenditure Allocation in Education (BDBP)*

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, pemerintah pusat mewujudkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 21 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini untuk mengatasi penerimaan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah yang kurang berkembang masih dapat diperkecil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sejak kali pertama IPM diperkenalkan, UNDP selalu berkesinambungan dalam mencatat perkembangan pembangunan manusia di berbagai negara. Pada tahun 2015, UNDP mencatat bahwa IPM di Indonesia telah mencapai 68,9. IPM 2015 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya. Dengan tingkat IPM tersebut, Indonesia masih menyandang predikat “sedang” dalam pembangunan manusia. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di peringkat

113 dari 188 negara di tahun 2015. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Keberhasilan Indonesia tidak lepas dari perkembangan indikator yang menyusun pembangunan manusia. Seluruh indikator menunjukkan perkembangan yang positif selama 25 tahun terakhir. Angka Harapan hidup saat lahir di Indonesia meningkat 5,8 tahun selama periode 1990-2015. Pada bidang pendidikan, harapan lama sekolah di Indonesia meningkat 2,8 tahun selama 25 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah Indonesia telah meningkat 4,6 tahun. Sedangkan untuk Pendapatan per kapita Indonesia selama 25 tahun ini juga meningkat sebesar 5.783.

Dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan dengan mutu atau kualitas yang baik pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1995 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah Republik Indonesia tengah berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Indonesia lewat komitmennya dalam Nawacita. Untuk merealisasi itu, pemerintah menyusun Program Indonesia Pintar (PIP) yang secara hukum tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (BPS, 2017).

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

DENGAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Jawa)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: data-data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah Bidang Pendidikan (BDBP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji K-S terlihat besarnya nilai K-S adalah 0,051 dan signifikansinya adalah $0,200 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2012: 160).

Hasil uji multikolonieritas dapat ditunjukkan dengan nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari tiap-tiap variabel independen. Jika nilai *tolerance value* lebih besar dari 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat dinyatakan bebas dari uji multikolonieritas (Ghozali, 2012: 105-106).

Kriteria pengujian *rank spearman* adalah jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih kecil dari nilai 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dan moderating adalah

PAD, DAU, PAD dan BDBP, dan DAU dan BDBP secara berurutan adalah 0,088; 0,637; 0,427; dan 0,999 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai $p > 0,05$. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini (Martono, 2012).

3.2 Uji Hipotesis

Nilai R^2 dalam uji *Moderated Refression Analysis* (MRA) diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,082. Hal ini berarti bahwa 8,2% variasi variabel IPM dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 91,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Hasil Uji F diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2,894 > 2,69$ dan nilai signifikansi $= 0,017 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan model regresi dinyatakan fit. Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yang terdiri atas PAD, DAU, dan pemoderasi secara keseluruhan berpengaruh terhadap IPM.

Dari hasil pengujian uji t yaitu: (1) Dapat diketahui bahwa PAD memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 3,227 lebih besar dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1,98326. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H_1) diterima. (2) Dapat diketahui bahwa DAU memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu $0,032 < 0,05$ dan dengan uji-t pengujian dua sisi (*two tails*), dihasilkan nilai T_{hitung} sebesar -2,171 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar -1,98326. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel DAU mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) diterima. (3) Dapat diketahui bahwa PAD dan BDBP memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,007 < 0,05$ dan dengan uji-t pengujian dua sisi (*two tails*), dihasilkan nilai T_{hitung} sebesar -2,775 lebih kecil

dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar -1,98326. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel PAD dan BDBP berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Keempat (H_3) diterima. (4) Dapat diketahui bahwa DAU dan BDBP memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,342 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 0,955 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1,98326. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel DAU dan BDBP tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kelima (H_4) ditolak.

3.3 Pembahasan Hasil Analisis

Variabel PAD dapat diketahui nilai t-hitung sebesar 3,227 dengan nilai positif, lebih besar dari t-tabel 1,98326 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima, artinya PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, semakin meningkat PAD, maka peningkatan IPM juga semakin meningkat.

PAD memiliki peran yang penting terhadap IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM karena PAD lebih berorientasi pada pembangunan yang menunjang IPM seperti Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi PAD yang terdapat di daerah masing-masing guna memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat dan meningkatkan capaian IPM dimasa mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016), dan Amalia (2016).

Variabel DAU dapat diketahui nilai t-hitung sebesar -2,171 dengan nilai negatif, lebih kecil dari t-tabel -1,98326 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,032 < 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima, artinya DAU berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

DAU diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. DAU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa alokasi DAU masih belum optimal bahkan kurang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan DAU masih lebih banyak dialokasikan untuk menunjang Belanja Pegawai yang semakin besar. Artinya, bahwa peningkatan DAU tidak sejalan dengan kenaikan Belanja Pendidikan di Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan peningkatan alokasi DAU justru memperkecil belanja yang digunakan untuk pembangunan, sehingga berdampak pada semakin turunnya IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bau (2011), dan Raviyanti, Rahayu, dan Mahardika (2017).

Variabel PAD dan BDBP dapat diketahui nilai t-hitung sebesar -2,775 dengan arah negatif, lebih kecil dari t-tabel -1,98326 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima, artinya PAD dan BDBP berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Alokasi Belanja Daerah Bidang Pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintahnya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam persaingan kerja, namun lebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dalam hal ini alokasi belanja bidang pendidikan dipandang mampu untuk memoderasi pengaruh PAD dengan IPM akan tetapi memiliki pengaruh negatif, hal ini membuktikan bahwa pengalokasian Belanja Bidang Pendidikan masih justru menjadi hambatan untuk hubungan PAD dengan IPM yang mengindikasikan bahwa PAD lebih digunakan untuk peningkatan indikator IPM non

pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012), Perdana (2013), dan Christy dan Adi (2009).

Variabel DAU dan BDBP dapat diketahui nilai t-hitung sebesar 0,955 lebih kecil dari t-tabel 1,98326 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,342 > 0,05$. Oleh karena itu H_4 ditolak, artinya DAU*BDBP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Diterimanya DAU oleh pemerintah daerah berarti daerah memiliki dana tambahan yang dapat dialokasikan pada sektor yang dapat meningkatkan IPM, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Namun, pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan infrastruktur daerah tersebut. Selain itu, DAU sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS). Ini bisa dilihat dari formasi DAU yang memasukkan komponen alokasi dasar sebagai komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM, karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan dialokasikan untuk belanja daerah bidang pendidikan yang dapat meningkatkan IPM, sehingga Belanja Bidang Pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan antara DAU dengan IPM (Ardiansyah, dkk, 2014).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Hasil pengujian uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), PAD dan BDBP, dan DAU dan BDBP berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan uji F sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian uji t atau uji parsial, sebagai berikut : PAD berpengaruh terhadap IPM sehingga H_1 diterima. DAU berpengaruh terhadap IPM sehingga H_2 diterima. BDBP berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan PAD pada IPM sehingga H_3 diterima. BDBP tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan DAU pada IPM sehingga H_4 ditolak.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka agar dapat dijadikan acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Adapun saran-sarannya diantara lain, yaitu: (1) Penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode waktu penelitian yang lebih dari satu tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. (3) Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan SiLPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Risha. 2016. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi kasus pada Kabupaten Kota di Jawa Tengah Periode 2012–2014”*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Ardiansyah, dkk. 2014. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”*. Jurnal (SNA 17).
- Badan Pusat Statistik. 2017. *“Indeks Pembangunan Manusia 2016”*. Jakarta-Indonesia
- Bau, Maria Yunitha. 2012. *“Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2005-2009”*. Diss. UPN Veteran Yogyakarta.
- Christy, Fhino Andreadan Priyo Hari Adi. 2009. *“Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia”*. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2012. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20”*. Semarang: UNDIP.
- Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2009. Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *“Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Martono, Nanang. 2012. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi”*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Perdana, Tommy Miks. 2013. *“Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian untuk Belanja Pendidikan (Studi Empiris Pemda/Pemkot di Wilayah Karesidenan Surakarta)”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Raviyanti, Ayu Aldi, dkk. 2017. *“Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009-2013”*. Jurnal Manajemen. Vol. XXII. No. 02. Juni 2017: 243-256

Santoso, Singgih. 2000. *“Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sari, Ida Ayu Candra Yunita dan Supadmi, Ni Luh. 2016. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 13.3. Juni 2016: 2049-2438

Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012. *“Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad, terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening”*. Prestasi Vol. 9 No. 1.

Sugiyono. 2010. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta

Sumarmi, Saptaningsih. 2010. *“Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta”*. (Doctoral dissertation, Tesis. Yogyakarta).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://www.statisticssolutions.com/directory-of-statistical-analyses-general-moderator-variable/>
www.bps.go.id
www.djpk.depkeu.go.id